

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota-kota di Indonesia lahir jauh lebih belakangan dibandingkan kota-kota di belahan dunia lain, semisal di Timur Tengah atau di Eropa.¹ Selama ini di Indonesia pada masa-masa awal banyak ditemukan peninggalan dari kerajaan dan tempat ibadah atau ritual keagamaan, dari hasil penemuan itu tidak menunjukkan sebagai ciri khas sebuah kota. Pada awalnya di Indonesia banyak memiliki kerajaan dan dari semua kerajaan yang ada di Indonesia membangun sebuah kota, akan tetapi tidak bisa dikatakan sebagai kota karena tidak ada struktur keruangnya.

Perkembangan kota-kota di Indonesia bisa dilihat dari budaya dan politik, hal itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik kota tersebut. Perkembangan kota-kota di seluruh dunia pasti memiliki fase atau beberapa tahap dan terjadi perubahan, begitu juga di Indonesia dari Kota Tradisional, Kota Kolonial dan Kota Pasca Kolonial. Kota Tradisional merupakan kota yang dibentuk atau dibangun oleh pusat-pusat kerajaan, selain Kota Tradisional bisa juga disebut dengan Kota Praindustri, untuk Kota Tradisional kebanyakan menjadi pusat dari pemerintahan dan keagamaan. Ciri-ciri dari Kota Tradisional bisa dilihat dari tembok atau dinding yang mengelilingi kota untuk melindungi kota dan raja.

¹ Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota*, (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm, 32.

Kota Kolonial merupakan kota yang dikembangkan oleh pendatang atau orang Eropa, akan tetapi berubah menjadi penjajahan. Kota Kolonial pertama di Indonesia adalah Batavia, orang Eropa yang datang ke Kota Indonesia pertama kali dari Portugal. Pada tahun 1619 Belanda membangun Kota Batavia bersamaan dengan tahun tersebut kota-kota di Indonesia berkembang dengan cepat. Infrastruktur pembangunan Kota Kolonial sangat baik, rapi dan teratur. Pada masa Kolonial ini pemerintahan Indonesia sepenuhnya dikendalikan oleh Kolonial Belanda. Pemerintah Belanda mengembangkan kota-kota menjadi lebih baik dan itu mengundang bangsa Eropa atau bangsa yang lain datang ke Indonesia untuk menetap.

Kondisi kota-kota di Indonesia pada masa Kolonial Belanda mulai tidak stabil dalam administrasi dan finansial. Kondisi kota yang mulai tidak teratur, kotor, kurangnya pasokan makanan, minuman dan fasilitas-fasilitas kota. Dengan kondisi seperti itu tentu saja menghambat perkembangan kota-kota di Indonesia. Pemerintah Belanda melakukan diskusi dan membentuk undang-undang, untuk memberikan hak otonomi ke kota-kota di Indonesia tapi tidak seluruhnya dan pemberian status administrasi memberikan dampak kejelasan terhadap batas-batas kota. Sebagian kota-kota besar di Indonesia berubah menjadi kota otonom yang memiliki pemerintahan sendiri terpisah dari pemerintahan pusat, akan tetapi tetap bertanggung jawab terhadap pemerintahan pusat. Dengan pemberian otonomi ke kota-kota di Indonesia menjadi tugas untuk membangun kotanya sendiri.

Pemerintahan di kota-kota Indonesia kembali berubah semenjak dijajah oleh Jepang. Pemerintahan Indonesia menjadi otoriter yang sebelumnya pada masa Belanda demokratis. Bukan hanya pemerintahan tetapi Jepang juga mengganti bahasa sehari-hari dari Belanda menjadi bahasa Indonesia, nama-nama lembaga yang sebelumnya menggunakan bahasa Belanda juga diganti menjadi nama-nama lembaga Jepang. Akan tetapi Jepang hanya menjajah Indonesia selama tiga setengah tahun setelah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, tidak lagi dijajah oleh Belanda atau Jepang. Struktur pemerintahan Kota pada masa awal kemerdekaan ini mengikuti bagaimana saat kondisi awal Indonesia, bahasa Indonesia digunakan untuk mengubah nama-nama kantor yang masih menggunakan bahasa Jepang atau bahasa Belanda. Masa ini sering terjadi kekacauan dan tumpang tindih karena dualisme pemerintahan di daerah, pada akhirnya dikeluarkan undang-undang pokok nomor 22 tahun 1948, tentang pemerintah daerah. Provinsi sebagai daerah tingkat I, kota besar dan kabupaten sebagai daerah tingkat II, kota kecil dan desa sebagai daerah tingkat III, dan pemegang kekuasaan tertinggi pada daerah otonom adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD), DPD dipimpin oleh walikota bertanggung jawab untuk memimpin daerah tingkat II.

Salah satu Daerah Tingkat I di Sumatera yaitu Provinsi Jambi dan memiliki Daerah Tingkat II yang merupakan Kota Jambi sebagai Ibukota dari Provinsi Jambi, mengemban amanat sebagai pusat pelayanan dan diarahkan sebagai pusat aktivitas sekunder dan tersier, yang mengandung pengertian bahwa

kebutuhan fasilitas perkotaan untuk Kota Jambi adalah pembangunan perkotaan dengan intensitas tinggi dan fasilitas yang meliputi listrik dan jaringan transportasi. Sebagai kawasan perkotaan, Kota Jambi merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan fungsi sebagai tempat pusat pemukiman, pemusatan disfungsi pelayanan jasa pemerintah, sosial dan ekonomi.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah pada eksistensinya berupa meningkatkan kewenangan dan peranan daerah dalam mengelola potensi yang ada guna mengoptimalkan, mendorong dan memberdayakan masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan melakukan pembangunan-pembangunan sarana umum atau kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat disadari oleh pemimpin atau Walikota yang ada di Kota Jambi. Dengan adanya pembangunan sarana ini, ekonomi masyarakat akan tumbuh, mulai dari usaha kecil dan usaha besar.

Kerja keras dan pelayanan merupakan konsistensi Walikota Jambi untuk mendorong pertumbuhan pembangunan Kota Jambi. Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pemulihan kebutuhan akan pemukiman merupakan salah satu yang menjadi perhatian. Berdasarkan kajian ekonomi kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (Triwulan tahun 2009) menyebutkan bahwa diperkirakan tambah melambat yaitu sebesar $5,50 \pm 1\%$.² Pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi yang utama pendorong ekonomi Kota Jambi. Hal ini tercermin

² Wawancara dengan Ibu Nur Indrayeti, SKM, M.Epid, tanggal 25 September 2018. Pukul 17.25.

dengan terus meningkatnya indeks ekspetasi penghasilan yang meningkat menjadi 160,67 dibandingkan dengan 130,67 laporan triwulan sebelumnya.

Meningkatnya ekspetasi ini sejalan dengan kenaikan upah minimum Provinsi (UMR) Jambi menjadi Rp 800.000,00 (naik 10,14%). Kondisi ini juga menunjukkan bahwa masyarakat yakin dimasa berikutnya akan meningkat sehingga konsumsi terhadap barang dan jasa juga semakin besar. Dengan melihat kondisi tersebut dan ekspetasi atau kemungkinan yang akan terjadi, masyarakat akan merasa Kota Jambi sebagai tempat yang memungkinkan untuk mendapat kehidupan yang layak. Dalam pemerintahan di Kota Jambi periode 1993-2018 (25 tahun) yang dipimpin oleh 4 Walikota banyak sekali perubahan dan peningkatan. Sebagai gambaran dengan adanya kebijakan pembangunan sarana oleh para Walikota Jambi selama kurun waktu 1993-2018 dapat disampaikan sebagai berikut.

Tahun 1993-1998 di era kepemimpinan Bapak Drs. H. Muhammad Sabki mulai ada pembangunan kebutuhan masyarakat untuk perumahan. Pembangunan perumahan sebagai kebutuhan dasar manusia, dengan dibukanya Perumnas bekerja sama dengan BTN untuk memenuhi rumah bagi masyarakat terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum memiliki rumah di daerah Pal Merah. Pembangunan perumahan sangat pesat di wilayah Aur Duri. Hal itu sejalan juga telah dibukanya akses ke Sebrang Kota Jambi yaitu adanya Jembatan Aur Duri.

Selain itu juga peningkatan distrik sarana transportasi dan jalan. Adanya pembangunan terminal baru di Kenali Besar, membuat perekonomian semakin

berkembang, terminal Simpang Kawat dipindahkan ke Terminal Alam Barajo. Dengan pemindahan tersebut, angkutan transportasi lokal akhirnya mencapai jarak yang berkembang, begitu juga dengan adanya pembangunan Perumnas di daerah Kenali Besar.

Dengan berkembangnya perumahan permukiman tersebut, disekitarnya mulai bermunculan pertokoan dan tempat belanja masyarakat dan termasuk pasar-pasar tradisional. Di era ini juga mulai muncul pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan, seperti Novotel, Abadi dan lain-lain. Begitu juga dengan adanya pusat belanja DinZa serta Matahari. Adanya pusat perbelanjaan seperti Mall menjadi daya tarik masyarakat Kota Jambi. Dalam sistem pemerintahan pada periode ini masih dalam bentuk dekonsentrasi dari pemerintahan pusat, provinsi, kota/kabupaten (secara berjenjang) baik dari peraturan sampai ke pembangunan. Pada era ini perkantoran masih ada kantor dinas dan kantor departemen.

Pada tahun 1998, terjadi Reformasi di Indonesia dan ini membawa dampak yang besar dalam sistem pemerintahan. Mulai saat itu muncul wacana otonomi daerah, pelaksanaan pemerintahan yang bersifat *Buttom Up*. Namun di Kota Jambi secara umum perkembangan dan pergerakan pembangunan tetap berjalan dan pada prinsipnya semua adalah untuk kelancaraan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, mempermudah akses atau jangkauan masyarakat. Ini berlanjut sampai ke kepemimpinan Arifien Manap. Dan pada era dua kepemimpinan ini penataan perkantoran kota Jambi sudah di pusat wilayah Kota Baru.

Tahun 1998-2003 dan 2003-2008 di era kepemimpinan Bapak Arifien Manap yang berlangsung selama 2 periode mengalami beberapa perubahan seiring dengan Reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kelonggaran untuk beberapa pelaksanaan pemerintahan diatur dan diusulkan oleh walikota.³ Pada saat itu daerah sudah mulai mengatur pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk kelancaran transportasi untuk mempermudah akses masyarakat ada pembangunan jembatan Makalam. Perkembangan di pusat Kota yaitu adanya WTC Jambi yang menjadi tempat belanja.

Selain hal tersebut Kota Jambi selama ini belum mempunyai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan di era ini juga di bangun RSUD H. A, Manap di daerah Mayang. Dengan adanya pembangunan RSUD menjadi lebih berkembang dan mulai banyak tumbuh pertokoan dan pembangunan perumahan-perumahan. Hal ini juga menjadi peluang bagi masyarakat untuk mulai membuat usaha. Di akhir periode kepemimpinan Arifien Manap, sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku di seluruh Indonesia, pemilihan kepala daerah dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala daerah (PILKADA) bukan oleh DPRD lagi.

Pada tahun 2007 menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan untuk pertamakalinya di Kota Jambi, masing-masing calon walikota masuk melalui beberapa partai pendukung. Gerakan-gerakan antar partai pendukung dan masa juga terjadi, namun sesuai dengan aturan-aturan yang ada

³ Wawancara dengan Bapak Didik Sunaryadi SKM, M,Kes, tanggal 25 September 2018 . pukul 19.50.

dan peran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka pesta rakyat untuk pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan terpilih pasangan. Pemenang hasil pemilihan kepala daerah tersebut adalah pasangan Bambang Priyanto dan Sum Indra.

Tahun 2008-2013 disaat kepemimpinan Bapak Bambang Priyanto, merupakan masa-masa peralihan-peralihan pelaksanaan beberapa kebijakan, sehingga masih ada beberapa multi tafsir dari pelaksanaan pembangunan. Peran kantor departemen sebagai perwakilan pemerintahan dan kebijakan pemerintahan masuk dalam kebijakan pemerintahan daerah. Pelaksanaannya berkordinasi dengan kementrian secara vertikal dan secara horizontal pelaksanaan pemerintahaan bertanggung jawab kepada Walikota sebagai pemimpin atau kepala daerah.

Selain dalam pemerintahan, beliau lebih banyak memajukan usaha Upaya Kecil Masyarakat (UKM), dimana banyak kegiatan ekonomi kerakyatan atau usaha-usaha rumah tangga berkembang. Hal ini juga memberi kesan yang berbeda sendiri, dimana-mana muncul kuliner dari kaum muda. Pergerakan kaum muda mulai terlihat sebagai pelaku ekonomi. Perubahan atau perbaikan pasar-pasar tradisional menjadi pasar yang layak dan bersih dengan di mulainya penataan, seperti pasar TAC dan pasar Talang Banjar.

Untuk bagian Timur, dengan adanya dibuka jembatan Aur Duri II di era sebelumnya juga menjadi berkembang sebagai pusat perekonomian di wilayah Payo Selincih. Sedangkan bagian Barat, juga mulai berkembang sebagai

pertumbuhan ekonomi dari Sipin sampai kearah keluar Kota Jambi (Mendalo) menjadi area pengembang ekonomi. Sebagai tempat perbelanjaan yang mulai ada saat ini, pemerintah mengizinkan investor dari luar seperti munculnya Indomart dan Alfamart. Hal ini selain mempermudah masyarakat untuk pergi belanja. Menjadi motivasi sendiri sebagai pelaku usaha daerah untuk memperbaiki sistem manajemen pengelola usahanya.

Semua kegiatan yang terlaksana sangat membawa perubahan kehidupan masyarakat Kota Jambi kehidupan yang modern. Kemajuan transportasi juga membawa pengaruh yang pesat. Dimana transportasi udara sudah mulai banyak dan terjangkau oleh masyarakat. Akses masyarakat untuk keluar Jambi dan masuknya masyarakat dari luar Kota Jambi meningkat.

Tahun 2013-2018 era kepemimpinan Bapak Syarif Fasha periode 2013-2018, cukup banyak perubahan yang sangat signifikan, dan itu menjadi daya tarik bagi masyarakat luar kota Jambi untuk berkunjung maupun jadi investor. Sesuai dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) kota Jambi tahun 2012-2016 adalah dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor. (sumber RKPD walikota Jambi tahun 2019).

Secara umum yang dirasakan masyarakat selama kepemimpinan Syarif Fasha adalah terjadi pembangunan infrastruktur (jalan, baik jalan utama sampai ke jalan-jalan di RT, perbaikan saluran air, penerangan jalan) semua itu dengan visi walikota Jambi yaitu menjadikan kota Jambi sebagai pusat perdagangan jasa dengan moto “Jambi Bangkit” bisa tercapai. Untuk keberhasilan dari

pemerintahan dapat dilihat dari 3 indikator yaitu, dari sisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dari 3 indikator tersebut, maka dalam era kepemimpinan Walikota Jambi, tidak terlepas perubahan dari sektor diatas, sehingga sebagai dasar akan dikaji bagaimana ekonomi bisa baik di tunjang oleh sektor lain.

Menarik dan uniknya penulis memilih judul “Perkembangan Fisik Kota dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi 1993-2018)” untuk mengetahui lebih jauh bagaimana perkembangan fisik Kota Jambi dari masa Orde Baru ke Reformasi dan bisa dilihat bagaimana pertumbuhan ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memudahkan pembahasan dan menjadikan penelitian yang terarah, penjabaran dan perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini bisa diuraikan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan fisik Kota Jambi 1993-2018 ?
2. Bagaimana pertumbuhan ekonomi Kota Jambi 1993-2018 ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Jambi merupakan Ibukota dari Propinsi Jambi dan ruang lingkup penelitian ini mengambil di wilayah Kota Jambi. Memilih tahun 1993 karena pada tahun tersebut Indonesia masih pada masa Orde Baru, kemudian berlanjut pada tahun 1998 ke masa Reformasi hingga saat ini.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui perkembangan fisik Kota Jambi 1993-2018.
2. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Kota Jambi 1993-2018.

Manfaat Penelitian :

1. Segi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat membantu, menambah wawasan atau menjadi referensi bagi mahasiswa/i Jambi dan menjadi mata kuliah di program studi Ilmu Sejarah atau Pendidikan Sejarah dan muatan lokal di setiap Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kota Jambi.
2. Segi praktis, penelitian ini bisa menambah atau sumber informasi untuk seluruh masyarakat yang ingin mengetahui tentang Kota Jambi pada masa tersebut.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pembuatan tinjauan pustaka ternyata mempunyai tujuan yang harus selalu di perhatikan dimana bab ini berguna untuk mengembangkan wawasan serta pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap penelitian yang pernah dilakukan dalam suatu pembahasan.⁴ Sejauh yang diketahui oleh penulis saat ini, tulisan yang membahas tentang "Perkembangan Fisik dan Pertumbuhan Ekonomi Kota

⁴ <https://sarungpreneur.com/tinjauan-pustaka/>, diakses pada 24 Septmeber 2018, pukul 19.45.

Jambi (1993-2013)” belum ada yang melakukan penelitian/menulisnya, walaupun ada tentu untuk waktu dan tempat berbeda. Namun dalam penelitian ini ditemukan beberapa sumber tertulis seperti (Buku dan Skripsi) yang membahas tema sama dan dapat dijadikan perbandingan oleh penulis, sebagai berikut:

Pertama, buku yang ditulis oleh Purnawan Basundoro yang berjudul Pengantar Sejarah Kota. Menjelaskan tentang kota secara teoritik, kota dengan pendekatan evolusionis dan kota dengan pendekatan tematik, akan tetapi tidak menceritakan dalam kronologis.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Feri Ema Kurniawati yang berjudul Perkembangan Struktur Ruang Kota Semarang Periode 1960-2007 (Studi Pengembangan Struktur Ruang dari Masa Pasca Kolonial Sampai 2007). Menjelaskan bagaimana proses perkembangan Kota Semarang dalam periode waktu perubahan pada pasca Kolonial (1945-1970), Orde Baru (1970-1995) dan masa Reformasi (1995-2007). Selain menjelaskan perkembangan Kota Semarang dalam beberapa periode, juga menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan struktur ruang Kota Semarang dari masa ke masa.

Ketiga, skripsi yang ditulis Wiwik Yulianingsih yang berjudul Sejarah Kota Mojokerto 1918-1942. Menjelaskan proses pembangunan di Kota Mojokerto setelah ditetapkan gemeente (1918-1942) dan dampak dari pembentukan gemeente bagi perkembangan masyarakat Mojokerto pada tahun 1918-1942. Dampak positif dari pembangunan ini ada untuk masyarakat Kota Mojokerto

Keempat, skripsi yang ditulis Caesar Bodro Kusumo yang berjudul Kota Purworejo Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda 1900-1942. Karya ini menjelaskan Kota Purworejo dibawah pemerintahan Kolonial Belanda pada saat itu berhasil membangun fasilitas-fasilitas dari segi fisik maupun non fisik. Politik etis yang telah disepakati oleh pemerintah Belanda telah berhasil dilaksanakan untuk memakmurkan dan mensejahterakan daerah jajahan di wilayah Kota Purworejo. Kehidupan sosial dan pembangunan kota berlangsung dengan nyaman, aman dan lancar.

Dari hasil buku dan beberapa skripsi di atas, dapat diketahui yang menjadi perbandingan dengan penelitian saya adalah perkembangan fisik Kota dari tahun 1993-2018, menariknya pada tahun tersebut sistem pemerintahan Indonesia masih Orde Baru kemudian terjadi masa Reformasi hingga sekarang dan dari hasil perkembangan fisik Kota itu bisa dilihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.

1.6 Kerangka Konseptual

Sejarah kota lebih membahas tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar ada hubungan terhadap kota. Tentang ruang lingkup mengenai sejarah kota melalui pembahasan secara kronologis dan pembahasan secara tematik. Kronologi yang dimaksudkan adalah menjelaskan secara tertib atau berdasarkan urutan waktu dan Tematik yang dimaksudkan adalah proses pembelajaran yang saling berkaitan dengan tema pembahasan.

Sejarah kota berada dibawah institusi negara dan provinsi dan bersifat lokal karena institusi kecil. Kota adalah suatu pemukiman yang sangat padat di tempati oleh penduduk, memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, menjadi pusat ekonomi, hidup saling berkaitan antar masyarakat dan peradaban yang lebih maju.

Teori yang menjelaskan tentang kota cukup banyak, sehingga melahirkan pengertian kota dari berbagai sudut pandang. Tulisan ini menggunakan beberapa pendekatan teori. Dari aspek ekonomi, Max Weber memberikan pengertian bahwa kota adalah suatu permukiman tempat penduduknya lebih mengutamakan kehidupan perdagangan dan komersial dari pada pertanian. Oleh karena itu, Max Weber memberikan pengertian bahwa kota ialah tempat pasar (*market place*) atau sebuah permukiman pasar (*market settlement*).⁵ Menurut Sirjamaki, yang disebut kota merupakan pusat-pusat komersial dan industry, kota-kota juga merupakan sekumpulan penduduk dengan tingkat pemerintahan sendiri yang diatur oleh pemerintah-pemerintah kota.⁶ P.J.M. Nas sendiri memberikan lima aspek besar apa yang disebut kota, yaitu: 1) suatu lingkungan material buatan manusia, 2) suatu pusat produksi, 3) suatu komunitas sosial, 4) suatu komunitas budaya, dan 5) suatu masyarakat terkontrol.⁷

Menurut Menno dan Alwi, jika dilihat dari segi fisik, kota merupakan suatu permukiman yang mempunyai bangunan-bangunan perumahan yang jaraknya antara satu dengan lainnya relatif rapat, memiliki sarana-sarana dan

⁵ Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota*, (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm, 12.

⁶ Purnawan Basundoro. *Ibid.* hlm. 13.

⁷ Purnawan Basundoro. *Ibid.* hlm, 14.

prasarana-prasarana, dan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warganya.⁸ Mengingat banyaknya pengertian tentang kota, J.H. De Goode mengusulkan agar kita cukup memperhatikan sejumlah ciri yang dipandang sangat menentukan watak yang khas dari kota. Ciri tersebut antara lain: peranan besar yang dipegang oleh sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa) dalam kehidupan ekonomi; jumlah penduduk yang relatif besar dan heterogen; dan kepadatan penduduk yang relatif besar.⁹

W.W Rostov seorang ahli sejarah menjelaskan proses pembangunan dibagi menjadi 5 tahap yaitu Tahapan tradisional dengan pendapatan perkapita yang rendah dan kegiatan ekonomi yang stagnan, tahapan transisional dimana tahap prakondisi bagi pertumbuhan dipersiapkan, tahapan lepas landas merupakan permulaan bagi adanya proses pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, tahapan awal menuju kematangan ekonomi, tahapan produksi dan konsumsi massal yang bersifat industri.

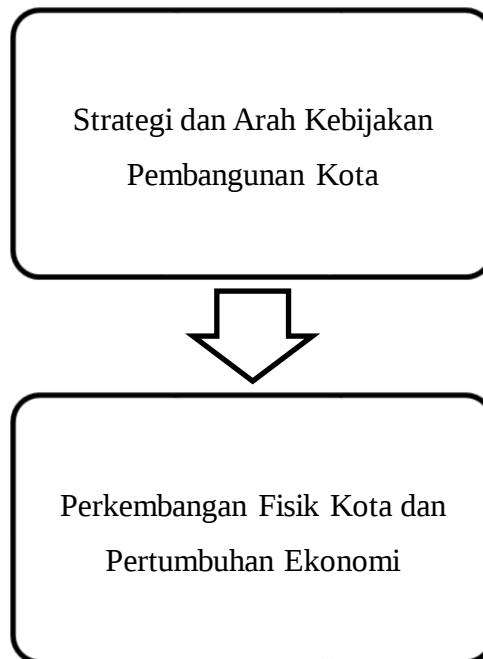
⁸ Purnawan Basundoro. *Ibid.* hlm. 14.

⁹ Purnawan Basundoro. *Ibid.* hlm. 14.

Gambar 1. 1

Kerangka Berfikir Perkembangan Aktifitas Ekonomi

Dari Aspek Pembangunan Kota Jambi



1.7 Metode Penelitian

Defenisi pertama mengambil pendapat Gilbert J. Garraghan S.J., *“Historical method is a systematic body of principles and rules designed to aid effectively in gathering the source-materials of history, appraising the critically, and presenting a synthesis (generally in witten from) of the result achieved”* (metode sejarah adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis, yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan bagi sejarah, menilai secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis dari hasil-hasilnya, biasanya dalam bentuk tertulis).¹⁰ Penulisan ini

¹⁰ Drs. Aam Abdillah, M.Ag., *Pengantar Ilmu Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.29.

termasuk dalam penelitian Kualitatif. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah melalui beberapa tahap.¹¹

Berikut adalah metode sejarah yang melalui beberapa tahap :

1. Heuristik, pengumpulan data atau sumber-sumber atau sejarah yang akan diteliti dan bisa juga ke museum. Data atau sumber-sumber tersebut bisa berbentuk sumber tertulis (buku, skripsi, jurnal, tesis, dokumen atau arsip) dan berbentuk sumber lisan (wawancara dan data-data dokumentasi). Dalam mengumpulkan sumber primer, penulis untuk mengumpulkan data atau sumber-sumber yang berhubungan atau saling berkaitan dengan tema atau judul Perkembangan Fisik dan Ruang Ekonomi Kota Jambi Tahun (1993-2013) dan melakukan wawancara dengan orang-orang pertama atau pelaku utama yang terlibat langsung. Langkah berikutnya mengumpulkan sumber-sumber sekunder berupa buku-buku yang relevan. Buku-buku tersebut bisa dicari di berbagai tempat seperti perpustakaan wilyah Jambi, perpustakaan daerah Jambi, perpustakaan DPR, Bapeda dan badan pusat statistik (BPS) Provinsi Jambi. Selain dari buku juga mewawancarai keluarga/kerabat dari tokoh/pelaku utama, tim sukses, pegawai-pegawai di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Jambi, Dinas Tata Ruang Kota dan orang-orang dalam partai yang terlibat mendukung tokoh tersebut bisa menjadi Walikota.

¹¹ Gotschlak, Louis. *Understanding History, Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. (Jakarta: UI Press, 1998). Hlm. 21.

2. Kritik Sumber, tahap menguji dari segi kebenaran materi atau keaslian isi dari sumber-sumber sejarah atau data yang sudah terkumpul. Kritik sumber terbagi 2 yaitu kritik Ekstern dan kritik Intern. Kritik ekstern merupakan Otensititas sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber dan kritik intern merupakan kritik yang mengacu kepada kredibilitas sumber, sumber itu asli atau dapat dipercaya tidak ada penambahan atau pengurangan.
3. Interpretasi, merupakan penafsiran atau menggabungkan semua data yang sudah terkumpul dan sudah diseleksi, data tersebut kemudian disusun menjadi fakta.
4. Historiografi, merupakan langkah akhir dari metode sejarah yaitu penulisan sejarah. Dari pengumpulan data atau sumber, dikritik atau diseleksi kebenarannya, setelah melakukan penafsiran digabungkan semua data menjadi fakta dan akhirnya dilakukan penulisan sejarah.

1.8 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran umum Kota Jambi, yang membahas tentang Sejarah Kota Jambi, geografis, demografis, motto, lambang dan isi makna lambang Kota Jambi,

Bab III: Hasil penelitian, membahas perkembangan fisik Kota Jambi 1993-2018. Sub bab *pertama* membahas tentang pasar tradisional ke pasar modern. Sub bab *kedua* membahas tentang pembangunan jalan. Sub bab *ketiga* membahas tentang objek pariwisata.

Bab IV: Hasil penelitian, membahas pertumbuhan ekonomi Kota Jambi 1993-2018.

Bab V : Penutup, yang berisikan kesimpulan dari hasil semua penelitian dan saran.